



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas**
Tahun Anggaran : 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
KOMISI PEMILIHAN UMUM									
1	Meningktanya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	70%	Sosialisasi kepada Masyarakat Umum	√	√	√	-	Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
		Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	70%	Sosialisasi kepada Perempuan melalui kelompok-kelompok masyarakat	√	√	√	-	Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
		Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	70%	Sosialisasi kepada pemilih disabilitas melalui kelompok-kelompok masyarakat	√	√	√	-	Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
		Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	70%	Pemutakhiran Data Pemilih		√	√		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Indikator Kinerja 1.5 Persentase Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu	80%	Verifikasi faktual Partai Pemilu				√	Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	80%	Alih Status	√	√	√	√	Divisi Hukum & Sumber Daya Manusia
		Indikator Kinerja 2.2 Pelayanan		Pelayanan					

		administrasi kepegawaian							
		Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	-	-	-	-	-	-	Divisi Hukum & Sumber Daya Manusia
		Indikator Kinerja 2.4 Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP pada tahun 2020.	WTP	Reviu Laporan Keuangan	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
				Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
3	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	80,0%	Bimtek dan Sosialisasi Peraturan KPU	√	√	-	-	Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
		Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	80%	Bimtek Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	-	√	-	-	Divisi Hukum & Sumber Daya Manusia

Kuala Kurun, 03 Maret 2024

Ketua,


Elfrinst G. Tumon

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas**
 Tahun Anggaran : **2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	2	3	4	5	6				7
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)									
1.1	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%	Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
1.2	Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	Pelaporan Keuangan	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
1.3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
1.4	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pemabayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU.	1 Layanan	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Uang Kehormatan	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Penyelenggaraan Operasional Perkntoran dan Dukungan sarana dan Prasarana (3360)									
2.1	Terlaksananya Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase kepatuhan dalam tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	80%	Penatausahaan BMN	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Tersedianya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai Data SAK	1 dokumen	Laporan SIMAK BMN dan rekonsiliasi BMN	-	√	-	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.2		Tersedianya Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 dokumen	Laporan stock opname	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan operasional perkantoran	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Penyelenggaraan Teknis Kepemiluan (6709)									
3.1	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Ketepatan Jadwal Pengumpulan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	80 %		√	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
3.2	Tersedianya dokumen perencanaan program dan	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran Tepat Waktu sesuai dengan siklus anggaran	80%	Penyusunan Renstra, Lakip, Perjanjian Kinerja,	√	-	-	-	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi

	anggaran yang berkualitas			Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi Tahunan					
3.3	Tersedianya administrasi penyelenggaraan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	Laporan pelaksanaan Kegiatan	-	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja	80%	Analisis Capaian Kinerja	√	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
3.4	Terlaksananya pengelolaan Program dan anggaran yang efisien dan terintegritas	Persentase Penyusunan perencanaan kegiatan dalam menghadapi Pemilu serentak	80%	Laporan pelaksanaan Kegiatan	-	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan Tahapan Pemilihan	80%	Revisi anggaran yang tepat guna dan fungsi	√	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
3.5	Terlaksananya Seleksi Badan Ad Hoc sesuai dengan ketentuan dan peraturan	Persentase pelaksanaan seleksi kegiatan perekrutan badan Ad Hoc Pemilihan	90%	Laporan pelaksanaan Kegiatan	-	-	-	√	Sub bagian Hukum dan SDM
		Persentase pencapaian kegiatan perekrutan badan Ad Hoc	90%	Laporan Progres Penjaringan badan Ad Hoc	-	-	-	√	Sub bagian Hukum dan SDM
3.6	Fasilitasi Pencalonan/Seleksi anggota KPU	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan Bimbingan Teknis Kepemiluan	Persentase pembelajaran bimtek kepemiluan	80%	Laporan pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	Sub bagian Hukum dan SDM
		Persentase laporan Realisasi keikutsertaan penyelenggaraan bimtek kepemiluan	80%	Laporan Progres realisasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.8	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Ketepatan Jadwal Pengumpulan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	70 %		√	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan	90%	Laporan Progres pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	√	√	√	√	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
3.9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu melalui sosialisasi	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	70 %	Sosialisasi Pemilihan terhadap 8 segmen	√	√	√	√	Sub bagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi masyarakat
		Persentase progres pelaksanaan kegiatan	90%	Laporan Progres partisipasi pemilih	√	√	√	√	Sub bagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi masyarakat

3.10	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	80 %	Bimtek dan Sosialisasi Peraturan KPU	√	√	√	√	Sub bagian Hukum dan SDM
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	80%	Bimtek Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	√	√	√	√	Sub bagian Hukum dan SDM
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumen Logistik (6871)									
4. 1	Tersedianya Logistik Pemilu	Persentase terpenuhinya sarana parasarana pendukung pelaksanaan pemilu	80 %	Penghapusan dan pencatatan Penilaian aset Eks pemilu dan Pilkada yang dilaporkan	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik
		Persentase sarana dan prasarana yang dilaporkan	80%	Penghapusan dan pencatatan aset BMN	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik
Pembentukan Badan Ad Hoc (6867)									
5.1	Terpenuhinya Badan Adhoc pemilu/Pemilihan	Persentase pemenuhan pembentukan badan adhoc	1 laporan	SDM Badan adhoc	√	√	√	√	Sub Bagian SDM & Parmas
Pengelolaan sarana IT Pemilu (6709. RAN)									
6.1	Meningkatnya manfaat penggunaan sarana prasarana IT Pemilu	Persentase pemanfaatan sarana IT Pemilu	1 Unit	Prasarana IT Pemilu	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik
Pelaksanaan tata kelola Kelembagaan Publik bidang politik (6872)									
7.1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Verifikasi partai Politik	Persentase input data Verpol pada aplikasi SIPOL	1 Laporan	Input data pada SIPOL	-	-	√	√	Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
7.2	Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik peserta pemilu	Pengelolaan pendaftaran dan verifikasi partai politik	80%	Verifikasi faktual Partai Politik	-	-	√	√	Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
7.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Verifikasi Partai Politik	Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Partai Politik	1 satker	Layanan Help Desk	-	-	√	√	Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
7.4	Penyelesaian Sengketa penetapan partai Politik	Persentase sengketa administrasi partai Politik	80 %	Bimtek dan Sosialisasi Peraturan KPU	√	√	√	√	Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

		Persentase sengketa yang hukum dimenangkan KPU	80%	Penyusunan dan kearsipan dokumen pendaftaran partai politik	√	√	√	√	Sub bagian Hukum dan SDM
--	--	--	-----	---	---	---	---	---	--------------------------

Kuala Kurun, 4 Maret 2024

Sekretaris,

Fransiskus Hartanto

